

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSUTUJUAN	i
HASIL REVISI TESIS	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
<i>ABSTRACT</i>	iv
INTISARI	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR SINGKATAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian	5
I. Manfaat Teoritis	5
II. Manfaat Praktis	6
E. Keaslian Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
I. Tinjauan Hukum Pasar Modal.....	9
a. Pasar Modal sebagai Sumber Pendanaan Perusahaan	9
b. Saham sebagai Efek bersifat Equitas	10
c. Obligasi sebagai Efek bersifat Utang	12
d. <i>Right Issue</i> atau Hak Memesan Saham Efek Terlebih Dahulu (HMETD) sebagai Efek dengan sifat Equitas dengan Hak Terbatas.....	12
e. Perdagangan Efek oleh Bursa Efek dalam Pasar Modal	15
f. Suspensi Perdagangan Efek Pada Bursa Efek	16
II. Tinjauan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).....	19
a. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan Hubungannya dengan Kepailitan.....	19

b. Unsur Unsur Utama Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.....	20
c. Skema Restrukturisasi pada Rencana Perdamaian Secara	21
d. Restrukturisasi pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN).....	25
e. Proses Restrukturisasi dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).....	29
f. Akibat dari Kepailitan & Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)	33
BAB III METODE PENELITIAN	36
I. Jenis Penelitian	36
II. Bahan Penelitian.....	36
III. Teknik Pengumpulan Data.....	37
IV. Analisis Data Penelitian.....	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	39
I. Pelaksanaan Skema Restrukturisasi Perseroan.....	39
i. Penyusunan Skema Restrukturisasi Pada Proposal Perdamain.....	39
ii. Restrukturisasi Garuda Indonesia sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN).....	49
iii. Penyertaan Modal Negara (PMN) dalam Penerbitan Saham Baru.....	53
II. Pelaksanaan Skema Penerbitan Saham Baru.....	58
i. Perencanaan Skema Penerbitan Saham Baru.....	58
ii. Pelaksanaan Skema Penerbitan Saham Baru	67
iii. Berakhirnya Suspensi Bursa Efek	70
BAB V PENUTUP	73
A. Kesimpulan	73
I. Kesimpulan dari Rumusan Masalah Pertama:	73
II. Kesimpulan dari Rumusan Masalah Pertama:.....	74
B. Rekomendasi	75
I. Rekomendasi untuk Rumusan Masalah Pertama.....	75
II. Rekomendasi untuk Rumusan Masalah Kedua	79
DAFTAR PUSAKA	i
Peraturan Perundang-Undangan	i
Buku, Jurnal, Artikel, Makalah.....	ii
Internet	iii

DAFTAR TABEL

Tabel 1.0. Tabel Keaslian Penelitian	8
Tabel 1.1. Komponen Saham Berdasarkan Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas	11
Tabel 1.2. Ketentuan Pemberian HMETD dalam Penambahan Modal lewat Penerbitan Saham Simpanan.....	14
Tabel 1.3. Ketentuan Pengecualian HMETD dalam Penambahan Modal lewat Penerbitan Saham Simpanan.....	14
Tabel 1.4. Ketentuan Pengeluaran Saham dengan Nilai Berbeda	15
Tabel 1.5. Penjelasan Sub Pasar Sekunder	16
Tabel 1.6. Prosedur Pembukaan Suspensi Perdagangan Efek.....	19
Tabel 1.7. Unsur-Unsur Utama Dalam PKPU	20
Tabel 1.8. Klasifikasi Kreditur untuk Debitor dalam Kepailitan dan PKPU.....	21
Tabel 1.9. Konsiderasi Restrukturisasi Sebelum dan Sesudah Terjadinya Cidera Janji Pembayaran Hutang.....	21
Tabel 2.0. Sinyal Sinyal Dibutuhkannya Restrukturisasi	22
Tabel 2.1. Komparasi Penyelesaian Restrukturisasi Bilateral dan PKPU	23
Tabel 2.2. Pertimbangan dalam Melaksanakan Restrukturisasi	24
Tabel 2.3. Tahapan Pelaksanaan Restrukturisasi.....	25
Tabel 2.4. Skema Restrukturisasi dalam PKPU.....	24
Tabel 2.5. Ketentuan Restrukturisasi BUMN Berdasarkan Undang Undang.....	26
Tabel 2.6. Ketentuan Privatisasi BUMN Berdasarkan Undang Undang	27
Tabel 2.7. Ketentuan Tata Cara Privatisasi BUMN Berdasarkan Peraturan Pemerintah	28

Tabel 2.8. Ketentuan Tata Cara Privatisasi BUMN Berdasarkan Peraturan Menteri	28
Tabel 2.9. Ketentuan PMN pada BUMN Berdasarkan Peraturan Pemerintah	29
Tabel 3.0. Ketentuan PMN pada BUMN Berdasarkan Peraturan Pemerintah	29
Tabel 3.1. Tahapan dalam Permohonan PKPU	31
Tabel 3.2. Ketentuan Berakhirnya PKPU	33
Tabel 3.3. Komparasi Akibat Terjadinya Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).....	35
Tabel 3.4. Sumber Bahan Hukum Penelitian	37
Tabel 3.5. Skema Restrukturisasi Garuda dalam Lingkup Restrukturisasi Perusahaan.....	46
Tabel 3.6. Kelompok Kreditur dengan Skema Restrukturisasinya dalam Perjanjian Perdamaian Garuda Indonesia.....	47
Tabel 3.7. Ketentuan Kunci Restrukturisasi Garuda Indonesia	47
Tabel 3.8. Perkiraan Pelaksanaan Rencana Perdamaian	48
Tabel 3.9. Opsi Yang Dapat Diambil Garuda Saat Restrukturisasi	50
Tabel 4.0. Skema Restrukturisasi Garuda dalam Lingkup Restrukturisasi Perseroan BUMN.....	52
Tabel 4.1. Transformasi Bisnis Garuda Indonesia.....	53
Tabel 4.2. Pelaksanaan PMN pada Skema Restrukturisasi Garuda Indonesia sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah	56
Tabel 4.3. Pelaksanaan PMN pada Skema Restrukturisasi Garuda Indonesia sesuai Ketentuan Peraturan Menteri	56

Tabel 4.4. Pelaksanaan Privatisasi pada Skema Restrukturisasi Garuda Indonesia sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah	58
Tabel 4.5. Pelaksanaan Privatisasi pada Skema Restrukturisasi Garuda Indonesia sesuai ketentuan Peraturan Menteri	58
Tabel 4.6. Penetapan Peraturan Pemerintah Tentang Penyertaan Modal Negara pada Skema Restrukturisasi Garuda Indonesia	62
Tabel 4.7. Pelaksanaan Penambahan Modal dengan HMETD sesuai dengan POJK pada Skema Restrukturisasi Garuda Indonesia	63
Tabel 4.8. Pelaksanaan Penambahan Modal tanpa HMETD sesuai dengan POJK pada Skema Restrukturisasi Garuda Indonesia	64
Tabel 4.9. Penerbitan Peraturan Pemerintah Tentang Penyertaan Modal Negara Pada Skema Restrukturisasi Garuda Indonesia	66
Tabel 5.0. Pelaksanaan Pengeluran Saham dengan Nilai Nominal Berbeda	67
Tabel 5.1. Penetapan Peraturan Pemerintah Tentang Perubahan Struktur Kepemilikan Saham Negara Melalui Penerbitan Saham Baru Pasca Penerbitan Saham Baru	69
Tabel 5.2. Prosedur Pembukaan Suspensi Perdagangan Efek	71
Tabel 5.3. Rekomendasi Khusus Penulis Untuk Tiga Pemangku Kepentingan Yang Sedang Terlibat dalam Penerbitan Saham Baru	79

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.0. Proses PKPU Garuda Indonesia.....	2
Gambar 1.1. Kelompok Kreditur Beserta Skema Restrukturasinya	3
Gambar 1.2. Peraturan Peraturan yang Berkaitan dengan Restrukturisasi Pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	51
Gambar 1.3. Peruntukan Skema Penerbitan Saham Baru.....	54
Gambar 1.4. Peraturan Peraturan yang Berkaitan dengan Penerbitan Saham Baru pada Skema Restrukturisasi Garuda Indonesia	55
Gambar 1.5. Peraturan Peraturan yang Berkaitan dengan Privatisasi pada Skema Restrukturisasi Garuda Indonesia	57
Gambar 1.6. Keterkaitan Peraturan Badan Usaha Milil Negara-Perseroan Terbatas-Pasar Modal pada Skema Restrukturisasi Garuda Indonesia.....	59
Gambar 1.7. Peraturan OJK yang Berkaitan dengan Penambahan Modal Dengan dan Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu pada Skema Restrukturisasi Garuda Indonesia	60
Gambar 1.8. Struktur PMHEMTD & PMTHMETD Dalam Skema Penerbitan Saham Pada Skema Restrukturisasi Garuda Indonesia	61
Gambar 1.9. Indikasi Jadwal Pelaksanaan PMHMETD & PMTHMETD	61
Gambar 2.0. Penerbitan Peraturan Pemerintah Pada Skema Pembiayaan Baru	62
Gambar 2.1. Penerbitan Peraturan Pemerintah Pada Skema Konversi Obligasi Wajib Konversi (OWK).....	65
Gambar 2.2. Jadwal Pelaksanaan Penerbitan Saham Baru	67
Gambar 2.3. Sistem Tata Kelola Garuda Indonesia.....	76

DAFTAR SINGKATAN

No.	Penulisan Singkat	Penulisan Lengkap
1.	APBN	Anggaran Pemasukan Belanja Negara
2.	BUMN	Badan Usaha Milik Negara
3.	BEI	Bursa Efek Indonesia
4.	BEJ	Bursa Efek Jakarta
5.	HMETD	Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu
6.	HIMBARA	Himpunan Bank Negara
7.	<i>IPO</i>	<i>Initial Public Offering</i> atau Penawaran Umum Perdana
8.	JATS	<i>Jakarta Auto Trading System</i>
9.	KIK EBA	Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset
10.	KUHPER	Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
11.	LTL	<i>Long-term Loan</i>
12.	LTP	<i>Long-term Payable</i>
13.	MBK	PT. Mitra Buana Koorporindo
14.	OJK	Otoritas Jasa Keuangan
15.	OWK	Obligasi Wajib Konversi
16.	PBH	<i>Power-by-hour</i>
17.	PERMEN	Peraturan Kementrian
18.	PP	Peraturan Pemerintah
19.	PIK	<i>Payable in-kind</i>
20.	PKPU	Penundaan kewajiban pembayaran utang
21.	PMHMETD	Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu
22.	POJK	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
23.	PMTHMETD	Penambahan Modal tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu
24.	PMN	Penyertaan Modal Negara
25.	PSAK	Prinsip-prinsip akuntansi standar Indonesia
26.	RUPS	Rapat Umum Pemegang Saham
27.	SMI	PT. Sinergi Multi Investasi
28.	UU	Undang Undang
29.	UUBUMN	Undang Undang Badan Usaha Milik Negara
30.	UUKPKPU	Undang Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
31.	UUPT	Undang Undang Perseroan Terbatas
32.	UUTK	Undang Undang Tenaga Kerja
33.	WDP	Wajar dengan Pengecualian
34.	WTP	Wajar Tanpa Pengecualian
34.	yoy	<i>year-on-year</i> (Tahun ke tahun)